

Siaran Pers

COP24 POLANDIA: INDONESIA, PEMBANGUNAN RENDAH KARBON, DAN ENERGI TERBARUKAN

KATOWICE – Sebagai salah satu negara dalam daftar 10 ekonomi terbesar di dunia berdasar produk domestik bruto yang diukur dengan paritas daya beli, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat konsisten Indonesia daalam sepuluh tahun terakhir. Dalam periode 2007-2017, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,69 persen per tahun. Indonesia juga telah berhasil memangkas tingkat kemiskinan sejak 1999, hingga mencapai di bawah 10 persen pada 2018. Namun, harus diakui pula bahwa ada kalanya pertumbuhan ekonomi tak melulu membawa kabar positif, terutama bagi lingkungan dan perubahan iklim. Perubahan pola hidup di kota, misalnya, adalah salah satu contoh terbaik. Di Indonesia, jumlah asyarakat yang hidup di kota meningkat sangat pesat, dari 77,9 juta jiwa pada 1997 hingga 144,3 juta jiwa pada 2017. Dengan rerata pertumbuhan populasi urban sebesar 4,1 persen, pada 2025, diperkirakan 68 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kota.

Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, kota-kota besar dengan isu kemacetan, polusi, hingga pengelolaan limbah, berkontribusi sebesar 70 persen terhadap emisi gas rumah kaca. Keberlanjutan sumber daya alam juga terancam dengan adanya permintaan suplai makanan, energi, air, dan transportasi yang identik dengan kebutuhan penduduk kota. Oktober 2018 lalu, *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) baru saja merilis *Special Report on Global Warming of 1.5°C*, sebuah laporan yang mengulas dampak perubahan iklim terkait naiknya pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celsius dan efek rumah kaca. Naiknya suhu bumi antara 1,5-4 derajat Celsius akan mempengaruhi produksi makanan dan meningkatkan risiko bencana yang disebabkan perubahan iklim. Pembakaran lahan gambut akan membuat kualitas hidup masyarakat menurun. Penggunaan energi dan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan akan menimbulkan krisis energi dan air. Fakta-fakta tersebut hanya sedikit dari banyaknya dampak negatif perubahan iklim bagi Indonesia.

“Indonesia menyadari betul dampak negatif dari perubahan iklim, keadaan yang sudah dirasakan, serta potensi yang mungkin terjadi. Untuk itu, Indonesia meluncurkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau Low Carbon Development Indonesia (LCDI) yang akan menjadi salah satu sorotan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan empat kebijakan menuju PRK, yakni memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan dan memperbaiki efisiensi energi, memperbaiki produktivitas pertanian, dan mendorong penanaman kembali lahan hutan sekaligus mengurangi deforestasi,” tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam *the 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change* atau COP24 yang berlangsung di Katowice, Polandia, Senin (10/12).

Terkait permasalahan kota, Indonesia telah mengintegrasikan prinsip New Urban Agenda yang dirilis United Nations-Habitat pada 2016 ke dalam peraturan nasional tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development*. Tercatat tiga misi lingkungan ditetapkan bagi kota-kota di Indonesia, yakni kota yang inklusif dengan akses universal terhadap pelayanan dasar, kota yang makmur, produktif, dan kompetitif, serta kota yang hijau dengan prinsip pengelolaan sumber daya efisien dan berdaya tahan untuk kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pro lingkungan tersebut, Indonesia diprediksi mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5-6 persen pada 2045. Implementasi PRK akan didukung dengan instrumen pendanaan dan investasi yang inovatif, semisal skema *blended finance* hingga *green bonds*. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga telah membentuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang bertugas untuk mengimplementasikan pengembangan PRK yang mendorong aksi pencegahan perubahan iklim di tingkat komunitas.

Transisi menuju energi baru dan terbarukan yang lebih efisien juga terus didorong dengan berpedoman pada tiga pilar pembangunan energi, yakni pemenuhan kebutuhan energi domestik melalui diversifikasi energi dan program konservasi, peningkatan nilai sumber daya dengan pengembangan *downstream industry*, dan pengembangan regional untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Meski memiliki potensi energi baru dan terbarukan hingga 441,7 GW, namun Indonesia baru menggunakan dan membangun fasilitas dengan total energi sebanyak 9,18 GW, atau hanya dua persen dari potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemerintah menargetkan bauran energi sebesar 31 persen pada 2050 yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hal tersebut membuka kesempatan yang semakin luas bagi investor dan pelaku pembangunan untuk menysasar sektor energi baru dan terbarukan. “Kementerian PPN/Bappenas memfasilitasi solusi pendanaan dengan mengembangkan RE-Pro, daftar proyek dengan energi baru dan terbarukan beris rangkuman proyek-proyek yang telah siap untuk pendanaan. Daftar tersebut juga mendesain mekanisme pendanaan untuk menyalurkan pinjaman lunak dari partner pembangunan dan institusi pendanaan hingga menghasilkan Independent Power Producer. Kunci keberhasilan implementasi energi baru dan terbarukan di Indonesia adalah meningkatkan peran para pemangku kepentingan, baik publik maupun swasta, dengan menyediakan proyek yang tersusun rapi dengan detail lengkap agar kesesuaian dengan kebutuhan investor dapat dipenuhi,” ujar Menteri Bambang.

Katowice, Polandia, 10 Desember 2018

Parulian Silalahi
Plt. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, Faks.: (021) 31901154
e-mail: humas@bappenas.go.id